

Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum

Rifa Nabilah¹, Stevany Afrizal², Febrian Alwan Bahrudin³

¹ Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa-Banten

² Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa-Banten

³ Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa-Banten

E-mail: nabilahrifa@gmail.com

ABSTRAK

Politik uang saat ini sudah dianggap sebagai “kebiasaan” di masyarakat Maja. Bahkan pada masyarakat desa yang memiliki solidaritas kuat, politik uang dianggap memiliki peran kuat untuk mengikat suara masyarakat dalam kontestasi politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap fenomena politik uang, di Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Maja memiliki persepsi berbeda dengan norma hukum dalam memandang politik uang. Masyarakat menganggap bahwa politik uang adalah bentuk terimakasih atas suara yang akan diberikan dan pendekatan kepada masyarakat. Dalam teori tindakan sosial, Weber memperkenalkan konsep pendekatan *verstehen* untuk memahami makna tindakan seseorang. Dalam hal ini masyarakat Maja membangun persepsi dan keputusan tindakan didasarkan pada penglihatannya terhadap orang sekitar dan figur yang diteladani.

Kata kunci : Persepsi, Masyarakat Desa, Politik Uang, Pemilihan Umum

ABSTRACT

*Money politics is now considered a "custom" in the Maja community. Even in rural communities who have strong solidarity, money politics is considered to have a strong role to bind people's voices in political contestation. The purpose of this study was to determine how the public's perception of the phenomenon of money politics. in Maja Village, Maja District, Lebak Regency. The research method used is qualitative. The results of the study indicate that the people of Maja Village have different perceptions from legal norms in viewing money politics. The community considers that money politics is a form of gratitude for the votes that will be given and an approach to the community. In social action theory, Weber introduced the concept of a *verstehen* approach to understanding the meaning of one's actions. In this case, the*

Maja people build perceptions and action decisions based on their vision of the people around them and the figures they emulate.

Keywords : *Perception, Village Community, Money Politics, General Election*

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi menetapkan sistem pemilihan pemimpin negaranya melalui pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum merupakan ciri khas negara demokrasi yang bertujuan untuk menyatakan kedaulatan rakyat terhadap negara dan pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan hal yang sangat penting karena tujuan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan begini masyarakat dapat menentukan sendiri siapa yang berhak menjalankan dan memimpin negaranya (Nuraeni, 2013). Bagi negara demokrasi, pemilu menjadi mekanisme dan prasyarat yang utama. Demokrasi dianggap sia-sia jika tidak menghadirkan pemilu di dalamnya. Dalam gagasan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, namun jalannya roda pemerintahan akan tetap dilaksanakan oleh wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat (Gaffar, 2013).

Secara umum, sistem demokrasi yang esensinya memberikan kebebasan hak pilih bagi rakyat dapat memberikan dampak kebahagiaan untuk rakyat jika pelaksanaannya berjalan dengan adil. Rakyat akan merasakan nilai-nilai keragaman, toleransi, penghargaan, dan kebersamaan dalam pelaksanaan demokrasi. Namun jika pada akhirnya demokrasi hanya memberikan keuntungan pada pihak tertentu dan

menyisakan kesengsaraan bagi rakyat, maka pelaksanaan demokrasi itu dianggap gagal dan salah arah (Abbas, 2020). Untuk mencegah berbagai kecurangan, dalam pelaksanaan pemilu diperlukan pengelolaan dan pengawasan agar pemilu terlaksana secara sistematis, jujur dan adil. Pengelolaan sistematis pemilu dipegang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU).

Meskipun sudah ada lembaga yang berperan untuk mengawasi jalannya pemilu, namun pada praktiknya masih ditemukan kecurangan dalam pemilu, salah satunya fenomena “serangan fajar” atau politik uang. Politik uang diartikan sebagai praktik jual beli suara dalam kontestasi politik dengan memberikan imbalan tertentu kepada masa individu atau kelompok (voters) (Hudri, 2020). Praktik politik uang rentan terjadi bukan hanya di ruang lingkup yang luas seperti pemilihan eksekutif dan legislatif, namun rentan pula di lingkup kecil seperti pada pemilihan kepala desa.

Dalam norma hukum, praktik politik uang tidak dibenarkan karena akan mengganggu prinsip demokrasi. Secara tegas dalam pelaksanaan pemilu, politik uang telah dilarang sebagaimana Pasal 515 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau

memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)".

Meskipun dilarang oleh hukum, secara non etis masyarakat memiliki berbagai persepsi tersendiri terkait praktik politik uang ini. Peneliti memilih masyarakat di Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak sebagai subjek penelitian. Politik uang saat ini sudah dianggap sebagai "kebiasaan" di masyarakat umum. Bahkan pada masyarakat desa yang memiliki solidaritas kuat, politik uang dianggap memiliki peran kuat untuk mengikat suara masyarakat dalam kontestasi politik (Putri, 2020). Begitupun pada masyarakat Maja, mereka menganggap bahwa politik uang menjadi rezeki yang tidak terduga dan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya. Ada yang membelanjakannya untuk membeli kebutuhan rumah tangga, makanan, dan ada yang sekedar untuk bersenang-senang. Perilaku masyarakat ini menjadikan suasana ramai di Desa Maja saat periode pemilu. Bahkan para pedagang di pasar dan pedangang kaki lima di pinggir jalan merasa diuntungkan karena pembelian barang dagangannya meningkat.

Masyarakat menyambut politik uang ini dengan senang hati terlepas dari benar atau tidaknya praktik ini secara norma, namun mereka berpikir secara

realistis bahwa hal ini sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di masyarakat dan tidak dianggap menguntungkan bagi masyarakat. Masyarakat Maja memiliki persepsi bahwa calon pejabat yang memiliki loyalitas tinggi terhadap rakyatnya dalam bentuk apapun itu, misalnya mau menyapa masyarakat, gotong royong, peduli, dan memberikan bantuan dianggap lebih cocok menjadi pemimpin dibandingkan yang menampakkan kepentingan pribadi atau politiknya saja tanpa peduli rakyatnya. Maka dari persepsi inilah masyarakat menganggap politik uang adalah salah satu wujud loyalitas yang ditunjukkan calon pejabat kepada rakyatnya dan diluar norma hukum ini dianggap bukan sesuatu yang salah bagi sebagian masyarakat.

Dalam sistem masyarakat kapitalis, bahkan uang dapat membangun sebuah kharisma calon pejabat dan mempengaruhi hak pilih masyarakat (Rosyad, 2021). Di desa Maja ditemukan pula bahwa calon pejabat berusaha membangun kharismanya dengan menunjukkan loyalitas lewat politik uang. Melalui politik uang, masyarakat akan membentuk kelompok pendukung dan kelompok ini akan terus meluas karena masyarakat desa masih erat dengan solidaritas mekaniknya.

Memberikan gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan, peneliti mengacu pada kajian penelitian terdahulu. Beberapa diantaranya yaitu yang pertama pada penelitian dengan judul "Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019" oleh Fathur Rozy dkk, tahun 2019, Universitas Negeri

Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu praktik politik uang di Desa Sumberingin Kidul menunjukkan rendahnya kesadaran kontestasi politik yang sehat di dalam tubuh masyarakat.

Pada penelitian kedua dengan judul “Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kota Pariaman” oleh Eka Vidya Putra, tahun 2017, Universitas Negeri Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu money politics dilakukan hampir oleh semua calon legislatif. Politik uang dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uang tunai, bantuan untuk organisasi, bantuan infrastruktur, dan sebagainya.

Pada penelitian ketiga dengan judul “Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat” oleh Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago, tahun 2019, Universitas Mataram. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya politik uang di masyarakat adalah pengaruh keterbatasan ekonomi masyarakat, rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, dan lemahnya pengawasan yang dilakukan. (2) Ada 2 proses terjadinya politik uang, yaitu dilakukan secara langsung oleh calon atau kontestan politik tertentu serta dilakukan secara tidak langsung melalui perantara orang lain dalam memberikan dan mendistribusikan politik uang tersebut.

(3) Dampak yang ditimbulkan dari praktek politik uang dapat merusak tatanan demokrasi dan dapat menimbulkan masalah-masalah baru lainnya bagi masyarakat hingga pemerintah, sehingga membawa dampak negatif yang bersifat jangka panjang.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah fokus penelitiannya. Secara lebih lanjut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap fenomena politik uang dalam pemilu dan menganalisisnya secara sosiologis. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memperlihatkan kepada pembaca bahwa ilmu sosiologi dapat memandang suatu fenomena secara non etis. Artinya meskipun secara norma hukum politik uang ini dilarang, namun secara realita di masyarakat politik uang belum tentu salah karena masyarakat memiliki persepsi beragam yang dapat membuka sudut pandang lain.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Rivai dan Mulyadi (2013) dalam persepsi adalah suatu proses pengorganisasian dan penafsiran oleh individu untuk memaknai kesan-kesan yang ditangkap oleh indera mereka terhadap lingkungannya (Sutrisman, 2019:76). Thoha (2014) juga mengatakan bahwa kunci untuk memahami persepsi adalah mengenali bahwa persepsi berisi penafsiran yang unik, bukan penilaian tentang kebenaran terhadap suatu situasi (Sutrisman, 2019:76). Persepsi tidak berusaha untuk mencari kebenaran dalam sebuah situasi, melainkan konsep persepsi ini hanya memberikan

penafsiran unik yang dimiliki setiap sudut pandang individu.

Paul B. Horton dan Chester L. Hunt sebagai ahli sosiologi mengartikan masyarakat sebagai kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok tersebut (Nurmansyah, 2019: 46). Dijelaskan oleh Mac Iver dan Charles bahwa unsur-unsur perasaan dalam masyarakat antara lain adalah seperasaan, sepenanggungan dan saling memerlukan (Soekanto, 2007: 22).

Secara umum politik uang diartikan sebagai sebuah cara untuk mempengaruhi perilaku orang melalui pemberian imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Pemahaman politik uang sebagai tindakan membagi-bagikan uang oleh publik dipahami sebagai praktik pemberian uang kepada masa (voters) secara berkelompok untuk keuntungan politis. Politik uang sebagai suatu bentuk pemberian menyuap kepada seseorang bertujuan agar orang yang dituju menjatuhkan pilihan pada calon yang disepakati. Politik uang sebagai cara instan untuk mencapai kekuasaan biasanya digunakan oleh perorangan ataupun kelompok untuk mendapatkan kursi jabatan menjadi anggota legislatif maupun menjadi kepala daerah-wakil kepala daerah melalui perebutan suara dalam pemilihan umum (Sugiharto, 2021:17).

Menarik dukungan masyarakat, para calon pejabat melakukan berbagai cara dalam berkampanye yaitu sosialisasi diri kepada masyarakat, memasang poster, membagi-bagikan uang sembako, bahkan memberikan janji untuk membangun fasilitas umum di bidang kesehatan, pendidikan, ibadah dan sebagainya. Politik uang bisa juga dilakukan dengan pemberian barang misalnya sembako berupa: beras, minyak goreng, teh, maupun mie instan, serta alat-alat perlengkapan ibadah dan sebagainya. Politik uang biasanya dilakukan oleh simpatisan, kader, atau bahkan pengurus partai politik pada saat sosialisasi kampanye atau pada pagi hari menjelang pelaksanaan pemilihan umum (Sugiharto, 2021:19).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimuat dalam pasal 1 ayat 1, didefinisikan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu juga diartikan sebagai sebuah bentuk ekspresi dari masyarakat sebagai pemilih untuk menentukan pemilihan politiknya melalui pemberian suara yang akan ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat politik (Sihabuddin, 2019:15).

Landasan teori yang digunakan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap politik uang ini menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Tindakan sosial merupakan suatu tindakan individu yang memiliki makna subjektif bagi dirinya dan memiliki keterkaitan dengan orang lain. Weber mengartikan bahwa tindakan sosial tidak selalu bersifat rasional tetapi terdapat berbagai tindakan nonrasional yang dilakukan oleh orang, termasuk dalam tindakan orang dalam kaitannya dengan berbagai aspek dari kehidupan, seperti politik, sosial, dan ekonomi (Damsar, 2015:116).

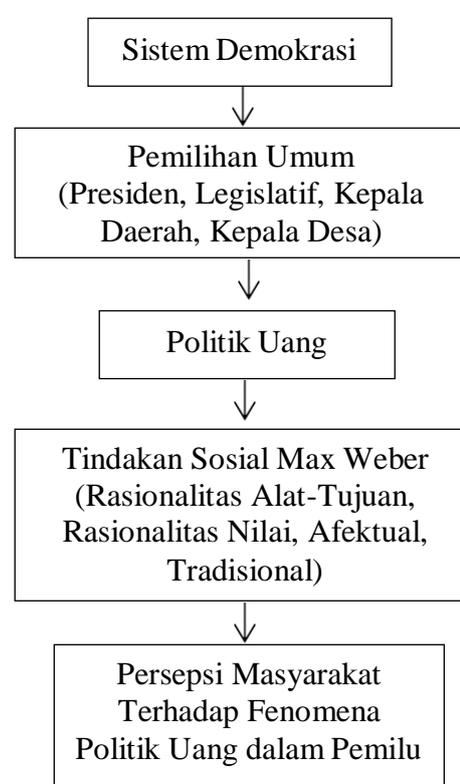
Weber memerhatikan tindakan yang dilakukan atas proses pemikiran. Tindakan dapat terjadi jika individu meletakkan makna-makna subjektif dalam tindakan mereka. Bagi Weber, analisis sosiologis mencakup penafsiran tindakan dari segi makna subjektifnya. Weber mengatakan bahwa para sosiolog mempunyai peluang yang jauh lebih baik untuk memahami tindakan secara rasional daripada memahami tindakan yang didominasi oleh perasaan atau tradisi. (Ritzer, 2012:216).

Ada 4 jenis tindakan menurut Weber, yaitu: 1) Tindakan rasionalitas alat-tujuan adalah sebuah tindakan yang ditentukan melalui pengharapan perilaku seseorang di dalam lingkungan dan pengharapan tersebut menjadi alat tercapainya tujuan sang aktor yang diperhitungkan secara rasional; 2) Tindakan rasionalitas nilai adalah tindakan yang ditentukan oleh kepercayaan akan adanya nilai tersendiri di dalam masyarakat. Bentuknya dapat berupa perilaku yang etis, estetis, atau

religius; 3) Tindakan afektual adalah tindakan yang ditentukan oleh keadaan emosional aktor; 4) Tindakan tradisional adalah suatu tindakan yang ditentukan oleh cara berperilaku sang aktor yang sudah lazim.

Kerangka Pemikiran

Memahami alur pikir dari penelitian, berikut kerangka pemikiran dari penelitian ini:



Sumber: data pribadi (2022)

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak. Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk memberikan makna yang jelas mengenai persepsi masyarakat di Desa Maja terkait politik

uang. Pendekatan ini prinsipnya untuk memahami perilaku dan pandangan subjek yang diteliti secara mendalam melalui wawancara dan pengamatan subjek secara langsung. Hasil penelitian ini diuraikan secara deskriptif berdasarkan data dari informan.

Dalam buku Sugiono (2019:18), dinyatakan bahwa metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data mendalam yang memiliki makna. Makna disini diartikan sebagai data yang memiliki nilai sebenarnya, yaitu dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi tetapi lebih menekankan pada makna yang diberikan oleh subjek.

Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan studi literatur. Observasi yang dilakukan menggunakan opsi non partisipan yaitu peneliti hanya sebagai observer dari objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang selanjutnya adalah wawancara. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara terbuka, hal tersebut agar peneliti dapat menggali informasi yang mendalam mengenai persepsi masyarakat dari politik uang masyarakat di Desa Maja. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Penelitian ini menggunakan literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu untuk mengkorelasikan data yang diperoleh di lapangan dengan teori-teori sosiologi yang relevan. Sebagai instrumen penelitian, peneliti mendalami teori-teori terkait terlebih dahulu untuk dapat bertanya, menganalisis, dan

mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti agar menjadi lebih terarah dan bermakna (Sugiyono, 2019:17).

Langkah yang terakhir adalah menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2019:322) meliputi : 1) Pengumpulan Data, 2) Reduksi data, 3) Penyajian Data, 4) Penarikan Kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang

Berdasarkan hasil wawancara dari 4 informan di Desa Maja, terdapat berbagai macam persepsi yang diutarakan informan terkait politik uang ini.

Menurut hasil wawancara ke 4 informan, politik uang saat pemilu masih terjadi di masyarakat Maja. Jenis politik uang yang pernah diterima oleh masyarakat maja yaitu saat pemilu presiden, anggota legislatif, kepala daerah, dan kepala desa.

Saat peneliti bertanya mengenai persepsi informan terkait kehadiran politik uang ini, MZ memandang bahwa selama calon pemimpin ini tidak memaksa dan mengancam dalam menggunakan hak suara, politik uang bukanlah kesalahan melainkan bentuk terimakasih kepada masyarakat. Ia menjelaskan dalam wawancaranya bahwa:

“kalo saya sih melihat sesuatu secara positif dari politik uang ini Neng, memang sih awalnya para calon pejabat memberi kami masyarakat uang untuk mencari simpati, tapi kami juga merasa dihargai atas waktu dan tenaga yang kami luangkan berangkat ke TPS

(Tempat Pemungutan Suara) untuk memilih mereka. Kalo saya sih asal si calon ga maksa atau ngancam ya santai aja mandang politik uang, malahan makasih udah inget masyarakat trus ngasih rezeki dadakan buat jajan, pasti kita antusias dong nyambutnya” -MZ.

Selanjutnya informan YR juga sejalan dengan pendapat MZ, YR menanggapi bahwa:

“secara hukum iya politik uang dilarang karena rentan mempengaruhi suara masyarakat, tapi kan masyarakat juga dapat menilai calon yang pantas untuk dipilih. Kita-kita ini punya naluri, jadi ga perlu takut, hak suara ga akan bisa dipaksa kok Neng. Justru melalui politik uang masyarakat bisa ngeliat mana calon pejabat yang murah hati dan perhatian sama rakyatnya, mana yang acuh aja tuh ga peduli. Kalo yang modelan kaya gini gimana bisa peduli sama kita pas udah kepilih”-YR

Dari dua pandangan informan, politik uang justru dianggap sebagai bentuk aksi sosial atau kepedulian ekonomi yang realistis dari calon pejabat terutama untuk kalangan menengah ke bawah. Masyarakat jelas menerima politik uang ini dengan antusias karena dianggap sebagai bentuk rezeki tambahan. Masyarakat merasa terbantu dengan pemberian politik uang karena uang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Lalu saat peneliti bertanya mengenai persepsi masyarakat terhadap calon pemimpin yang tidak melakukan politik uang, HM memberikan respon:

“Neng, zaman sekarang mah udah ga ada calon yang mau menang tapi ga

ngeluarin duit, ga bakal menang yang gitu mah”-HM.

Bahkan MI selanjutnya menyatakan bahwa calon pemimpin yang tidak memberikan apapun ke masyarakat saat masa kampanye adalah calon pemimpin yang pelit. Karena ia berpandangan bahwa:

“ eleh calon yang ga ngasih apa apa mah pelit, udah keliatan dari awal. Atuh gini aja sih Neng, kalo pas kampanye sebelum jadi pejabat aja udah pelit gimana kalo kepilih nanti, ga akan dilirik tuh masyarakat lagi susah juga”.-MI

MZ juga menanggapi bahwa politik uang merupakan salah satu bentuk pendekatan calon pejabat kepada masyarakat agar ia memiliki citra yang baik dan murah hati, ia memandang bahwa :

“kalo ga ada upaya pendekatan dari calon pejabat ke masyarakat, berarti calon itu ga mampu ngambil hati masyarakat dan ga ada usaha lebih untuk berkompetisi. Karena kalo mau meraih sesuatu orang kan harus berjuang, barulah nanti masyarakat yang lihat sejauh mana bentuk usaha para calon untuk menunjukkan kepedulian ke masyarakat, masyarakat mah realistis ya pasti nilai dari yang loyal sama memberikan dampak ekonomi dulu aja”.-MZ

Hasil jawaban informan, peneliti melihat justru terdapat persepsi masyarakat yang tidak sejalan dengan hukum. Jika hukum menganggap bahwa calon pemimpin yang ideal adalah yang bersih dari politik uang, namun masyarakat menganggap bahwa calon pemimpin yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat

baik dalam bentuk uang, barang, fasilitas bangunan, dan sebagainya maka ia dianggap sebagai calon pemimpin yang tidak peduli dan tidak sesuai dengan kriteria pemimpin ideal masyarakat di Desa Maja.

Bukan hanya dari keinginan mendapatkan uangnya saja, sebenarnya cara calon pemimpin ini menyampaikan maksud dan tujuannya melakukan politik uang kepada masyarakat juga menjadi salah satu penilaian masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara YR: *“ya kalo diliat-liat dari berbagai calon, saya lebih senang ketika calon yang mendatangi saya secara langsung, melakukan pendekatan emosional, dan mengutarakan tujuannya dengan sopan. Calon ini dilihat lebih beretika dibandingkan calon yang hanya menitipkan uangnya saja ke tim sukses tanpa ada omongan baik-baik buat ngejelasin tujuannya apa”*.-YR

Dari hasil wawancara kepada seluruh informan, bentuk politik uang dalam pemilu yang pernah mereka terima selama menjadi masyarakat di Desa Maja berupa uang, sembako, makan gratis, baju, fasilitas publik (masjid, mushola, perbaikan jalan, gedung serba guna). Dari semua bentuk tersebut, bentuk uang lah yang paling umum diterima masyarakat.

Ketika peneliti bertanya digunakan untuk apa hasil dari politik uang yang diterima masyarakat, MZ menjelaskan:

“Neng disini mah seru kalo lagi pemilu suka pada rame di pasar barang pada abis, di jajanan perumahan Citra, di Alfa, sama itu sekarang lagi pada senang naik mobil odong-odong. Ada juga yang beli baju, sembako, beli daging,

perabotan rumah, makanan, jajanan, pokoknya banyak lah beda-beda. Biasalah orang desa gimana sih kalo punya uang senang langsung dihabisin aja. Bermanfaat banget Neng ini buat kebutuhan kita”.-YR

MI juga menambahkan pernyataan dari YR:

“Iya seru Neng disini mah, apalagi kalo nanti misal ada calon yang menang, pasti pendukung-pendukungnya di traktir makan-makan atau ngekiwet gitu lah rame.”-MI

Dari hasil wawancara kedua informan, peneliti menemukan bahwa masyarakat Desa Maja memanfaatkan hasil politik uang ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para pedangang juga mendapatkan keuntungan lebih banyak saat momen pemilu ini.

Hubungan Sosial Yang Terbentuk Akibat Politik Uang

Peneliti mewawancarai MZ yang saat Pilkadaes pernah menjadi koalisi salah satu calon kepala desa. Ketika peneliti bertanya mengenai siapa saja koalisi yang terlibat saat pemilu, baik itu Pilkadaes atau yang lainnya, ia menjelaskan:

“Biasanya koalisi dari calon-calon ini dari keluarga sama kerabat dulu, terus ngedeketin kyai biasanya atau tokoh masyarakat, tetep aja ngedeketin yang gitu juga pake uang bukan ke masyarakat doang”.-MZ

Lalu peneliti bertanya mengenai sumber dana para calon, MZ menjelaskan kembali:

“Sumbernya yang utama dari dana pribadi kalo kades, terus kerabat paling. Kalo DPR ya dari partai atau ga nyari

sponsor pengusaha tar bales budinya pake proyek”. -MZ

Menyimpulkan dari hasil wawancara informan dan analisis peneliti, politik uang dapat membentuk hubungan-hubungan sosial antar masyarakat Maja. Saat calon pemimpin ini akan mencalonkan diri dalam pemilu, ia memperkuat hubungan dengan keluarga dan kerabat dekat. Kemudian ia membangun relasi dengan pihak-pihak yang memiliki peranan dan status untuk memperluas koalisinya. Pihak yang memiliki peranan dan status disini seperti tokoh masyarakat, kyai, dan pemilik modal untuk memperbanyak dukungannya. Lalu untuk mengikat masyarakat lainnya (terutama masyarakat menengah ke bawah) para calon pemimpin ini menggunakan politik uang untuk mencari simpati masyarakat.

Solidaritas mekanik dan solidaritas organik terbangun disini. Solidaritas mekanik terbangun berdasarkan kesadaran kolektif yang ditunjukkan oleh keluarga dan kerabat. Biasanya keluarga dan kerabat dekat ikut mendukung dengan menyumbangkan sejumlah uang dan ikut mempromosikan calon pemimpin yang terkait sebagai bentuk solidaritas tersebut. Lalu untuk solidaritas organik yang yang berdasarkan pada keterikatan hubungan kerja yang nantinya saling memberikan asas manfaat terjalin dengan tokoh masyarakat, kyai, dan pemilik modal. Tokoh masyarakat dan kyai memiliki pengaruh besar dalam masyarakat karena suara mereka lebih didengar oleh masyarakat Desa Maja sehingga berpeluang besar untuk memperbanyak suara. Dan untuk pemilik modal,

biasanya ia berperan sebagai pemodal dalam masa kampanye yang nantinya jika calon pemimpin ini menang akan memberikan asas manfaat berupa hubungan kerjasama proyek dan sejenisnya kepada para pemilik modal ini.

Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber

Peneliti menganalisis hasil penelitian menggunakan teori Tindakan Sosial yang dicetuskan oleh Max Weber. Weber memusatkan perhatiannya pada teori tindakan sosial yang berorientasi pada tujuan dan motivasi pelaku. Hal ini sejalan dengan topik penelitian ini mengenai persepsi masyarakat terhadap politik uang. Weber berpendapat bahwa untuk bisa membandingkan struktur pada masyarakat yang beragam, maka perlu dipahami alasan masyarakat tersebut bertindak, latar belakang yang mempengaruhi karakter mereka, dan perlunya pemahaman tindakan pelaku yang hidup pada masa kini. Namun kita harus dapat memahami bahwa tidak mungkin menggeneralisir semua masyarakat atau semua struktur sosial karena setiap orang punya alasannya tersendiri dalam bertindak (Jones 2016).

Berdasarkan hasil wawancara, di dapatkan bahwa alasan masyarakat menerima politik uang adalah karena adanya kebutuhan ekonomi, pendekatan emosional dari calon pemimpin yang dapat diterima masyarakat, adanya solidaritas yang terbangun, dan kebiasaan politik uang yang mengakar setiap ada kontestasi politik dalam pemilu. Namun sebagaimana telah dijelaskan oleh Weber bahwa setiap masyarakat tidak dapat digeneralisir, persepsi yang ada dalam

hasil penelitian ini hanya berlaku pada realitas di masyarakat Maja, belum tentu masyarakat lain memiliki persepsi yang sama.

Lebih lanjut Weber mengatakan bahwa pada hakikatnya setiap individu dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial tidak menjadi alat yang statis daripada fakta sosial yang memaksa (Wirawan, 2012). Artinya dalam praktik politik uang ini tindakan dan respon masyarakat dapat berbeda-beda terlepas dari bagaimana norma, nilai, atau kebiasaan yang umum dimasyarakat. Setiap individu memiliki kebebasan dalam mengekspresikan pandangan dan sikapnya. Sebagaimana yang terjadi pada informan MZ bahwa ia memiliki pandangan yang tidak sejalan dengan hukum mengenai makna politik uang ini sehingga dari perbedaan makna tersebut MZ akan lebih mengikuti pemaknaannya untuk menentukan tindakan yang ia lakukan.

Weber memperkenalkan konsep pendekatan *verstehen* untuk memahami makna tindakan seseorang. Seseorang bertindak bukan hanya berdasarkan keinginannya, namun ia juga menempatkan diri dalam lingkungan berfikir dan perilaku orang lain (Wirawan, 2012). Di masyarakat Maja tokoh masyarakat dan kyai yang dijadikan figur oleh masyarakat dalam menentukan pandangan dan tindakan. Sebagian masyarakat Maja sedikit banyaknya menentukan pilihan berdasarkan figur yang diikutinya. Maka tidak sedikit dari calon pemimpin yang membangun relasi dengan tokoh masyarakat dan kyai untuk menjadikan

mereka perantara dalam menyampaikan tujuannya kepada masyarakat.

Dari empat tindakan sosial yang dikemukakan Weber, terdapat tiga jenis tindakan yang ditemukan dalam penelitian. *Pertama*, tindakan rasionalitas alat-tujuan adalah sebuah tindakan yang ditentukan melalui pengharapan perilaku seseorang di dalam lingkungan dan pengharapan tersebut menjadi alat tercapainya tujuan sang aktor yang diperhitungkan secara rasional. Dalam penelitian ini, politik uang menjadi suatu alat (yang diharapkan masyarakat) untuk mencapai tujuan para calon pejabat yaitu meraih kemenangan dalam kontestasi politik pemilu.

Kedua, tindakan rasionalitas nilai adalah tindakan yang ditentukan oleh kepercayaan akan adanya nilai tersendiri di dalam masyarakat. Bentuknya dapat berupa perilaku yang etis, estetis, atau religius. Dalam penelitian ini, politik uang dipercaya masyarakat Maja memiliki nilai positif yaitu sebagai bentuk perhatian calon pejabat kepada masyarakat dan bentuk terimakasih karena masyarakat mau mendukung para calon.

Ketiga, tindakan tradisional adalah suatu tindakan yang ditentukan oleh cara berperilaku sang aktor yang sudah lazim. Di masyarakat Maja, politik uang sudah menjadi kebiasaan sejak lama hingga menimbulkan rutinitas setiap diadakannya pemilu. Ketika ada calon pejabat yang tidak melakukan politik uang, maka ia sudah mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yaitu “pelit”.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Maja memiliki persepsi berbeda dengan norma hukum dalam memandang politik uang. Masyarakat menganggap bahwa politik uang adalah bentuk terimakasih atas suara yang akan diberikan dan pendekatan kepada masyarakat. Alasan masyarakat menerima politik uang adalah karena adanya kebutuhan ekonomi, pendekatan emosional dari calon pemimpin yang dapat diterima masyarakat, adanya solidaritas yang terbangun, dan kebiasaan politik uang yang mengakar setiap ada kontestasi politik dalam pemilu. Dalam teori tindakan sosial Weber yang memfokuskan diri pada motivasi dan tujuan seseorang menentukan perilaku, Weber memperkenalkan konsep pendekatan *verstehen* untuk memahami makna tindakan seseorang. Dalam hal ini masyarakat Maja membangun persepsi dan keputusan tindakan didasarkan pada penglihatannya terhadap orang sekitar dan figur yang diteladani.

Saran untuk peneliti selanjutnya yang membahas mengenai persepsi masyarakat terhadap politik uang yaitu gunakanlah teori sosiologi lain untuk menganalisis terkait masalah ini agar hasilnya lebih beragam.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abbas Azhar, Timbul Dompok. 2020. *Dampak Demokrasi terhadap Kesejahteraan (Studi Kasus di Indonesia)*. Jurnal Dialektika Publik. Vol. 5, No. 1.
- [2] Damsar. 2015. *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Kencana.
- [3] Fitriani Lina Ulfa, L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago. 2019. *Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat*. RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual. Vol. 1, No. 1.
- [4] Gaffar, Janedjri M. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- [5] Hudri, Ahmad. 2020. *Badai Politik Uang dalam Demokrasi Lokal*. Malang: Inteligencia Media.
- [6] Jones Pip, Liza Bradbury, Shaun Le Boutillier. 2016. *Pengantar Teori-Teori Sosial (Terjemahan)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [7] Nuraeni, Susi. 2013. *Peran Komisi Pemilihan Daerah (KPUD) Dalam Pemilihan Langsung Di Kabupaten Sumedang Tahun 1999-2009*. Skripsi S1, Universitas Pendidikan Indonesia.
- [8] Nurmansyah Gunsu, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari. 2019. *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Lampung: Aura Publishing.

- [10] Putra, Eka Vidya. 2017. *Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kota Pariaman*. Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education. Vol. 4, No.1.
- [11] Putri, Magda Ilona Dwi., dkk. 2020. *Politik Dan Tradisi: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa*. Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 17, No. 2.
- [12] Rosyad, Sabilal. 2021. *Praktik Money Politics dalam Perspektif Sosio Legal Normatif*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- [13] Rozy Fathur, dkk. 2019. *Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019*. Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education Vol. 7, No.1.
- [14] Sihabuddin. 2019. *Menakar Efektifitas Pemilu Serentak Di Tengah Demokrasi Elektoral*. Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman. Volume 6, Nomor 1.
- [15] Soekanto Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- [16] Sugiharto, Imawan. 2021. *Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- [17] Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- [18] Sutrisman, Dudih. 2019. *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Bogor: Guepedia.
- [19] Sutrisman, Dudih. 2019. *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Bogor: Guepedia.
- [20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- [21] Wirawan, I.B. 2012. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.